

**ANALISIS SISTEM PEMBERIAN PINJAMAN DANA KEPADA
MITRA BINAAN OLEH BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN
BINA LINGKUNGAN (PKBL) DI PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA IV MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**NAMA : YULANA SAPUTRI
NPM : 1505170475
JURUSAN : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan membina:

MEMUTUSKAN

Nama : YULIANA SAMUTRI
NPM : 1505170475
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PEMBERIAN PINJAMAN DANA KEPADA MITRA BINAAN GLEH BAGIAN PROGRAM KEMERIAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) PADA PT. BERKEDIRAN SUMATERA IV MEDAN

Dinyatakan : *Si lulus Ujiansinya telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

PENGUJI I

(DAHRANI, S.E., M.Si)

PENGUJI II

(RIVA UBAR HARAHAP, S.E., M.Si)

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pengabdi

(ELIZAR SINAMBET, A., S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : YULANA SAPUTRI
NPM : 1505170475
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PEMBERIAN PINJAMAN DANA
KEPADA MITRA BINAAN OLEH BAGIAN PROGRAM
KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DI
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi



ELIZAR SIMBELA, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., M.M., M.Si

ABSTRAK

Yulana Saputri. NPM. 1505170475. Analisis Sistem Pemberian Pinjaman Dana Kepada Mitra Binaan Oleh Bagian Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, 2019. Skripsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penyaluran dana program kemitraan dan bina lingkungan di PTPN IV Medan periode 2016-2018. Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu penulis mengumpulkan data penelitian dan literatur-literatur lainnya dan kemudian menguraikan secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa nilai efektifitas program kemitraan berfluktuasi dimana terjadi peningkatan efektifitas program kemitraan yang disalurkan ditahun 2016 sebesar 75,79% dan kolektibilitas sebesar 68,69%, tahun 2017 efektifitas sebesar 71,73% dan kolektibilitas sebesar 80,41% dan tahun 2018 efektifitas sebesar 92,22% dan kolektibilitas sebesar 78,41%. Terjadi penurunan pada tingkat efektifitas di tahun 2017 diakibatkan jumlah yang tersedia jauh lebih besar dari dana yang disalurkan.

Kata Kunci : Sistem Pemberian Pinjaman Dana PKBL

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Wr.Wb.

Puji Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Skripsi ini berjudul: **“Analisis Sistem Pemberian Pinjaman Dana Kepada Mitra Binaan Oleh Bagian Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan”** yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan program strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam pembuatan skripsi ini, dan jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Sepanjang proses pembuatan skripsi ini, peneliti mendapat dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Teristimewa kepada Ayahanda **Sudirman** dan Ibunda **Nurita Br. Sianturi**, yang telah selalu senantiasa memberikan kasih sayang dengan mengasuh, membimbing dan mendoakan penulis, hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Kemudian dalam kesempatan ini peneliti juga menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Elizar Sinambela, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama masa perkuliahan.
9. Kepada seluruh staff biro Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada seluruh Karyawan PT Perkebunan Nusantara IV terkhusus pada unit PKBL Medan.

11. Kepada Kakanda tersayang Yulita, dan Adikku tercinta Yumia, Yescita, dan Yuhani, yang telah memberikan doa dan dukungan serta semangat kepada penulis.
12. Kepada seluruh teman-teman stambuk 2015. Khususnya kelas B Akuntansi Siang, yang telah bersama-sama dalam satu kelas selama 4 tahun masa perkuliahan.
13. Kepada teman-teman satu bimbingan Ibu Elizar Sinambela S.E, M.Si dimana kita telah bersama dalam proses bimbingan proposal hingga skripsi.
14. Serta kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, peneliti mengucapkan terima kasih atas semua bantuan, doa dan semangat yang selama ini telah diberikan.

Demikian peneliti sampaikan dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita peneliti dan bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Medan, September 2019

Penulis

YULANA SAPUTRI
NPM. 1505170475

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang masalah | 1 |
| B. Identifikasi masalah | 10 |
| C. Rumusan masalah | 10 |
| D. Tujuan dan manfaat penelitian..... | 11 |
| BAB II. LANDASAN TEORI..... | 12 |
| A. Uraian Teori..... | 12 |
| 1. Pinjaman atau Kredit | 12 |
| a. Pengertian Pinjaman atau Kredit | 12 |
| b. Jenis-jenis Kredit | 13 |
| c. Unsur-unsur Kredit..... | 14 |
| d. Tujuan dan Fungsi Kredit..... | 17 |
| e. Prosedur Pemberian Kredit | 19 |
| 2. Dana | 22 |
| 3. Kemitraan | 23 |
| a. Pengertian Kemitraan | 23 |

| | |
|--|-----------|
| b. Program Kemitraan sebagai Wadah UKM | 25 |
| c. Tujuan Kemitraan | 25 |
| d. Jenis-jenis Kemitraan | 26 |
| e. Bentuk Program Kemitraan | 27 |
| 4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)..... | 28 |
| a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 28 |
| b. Jenis dan Bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 31 |
| c. Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 32 |
| d. Masalah yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah... | 36 |
| B. Penelitian Terdahulu | 40 |
| C. Kerangka Berfikir | 41 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 45 |
| A. Pendekatan Penelitian..... | 45 |
| B. Definisi Operasional Variabel..... | 45 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian | 46 |
| D. Populasi dan Sampel..... | 47 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 47 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 48 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 50 |
| A. Hasil Penelitian..... | 50 |
| 1. Gambaran Umum Perusahaan | 50 |
| 2. Dana Program Kemitraan | 51 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Tata Cara Penyaluran Pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Peraturan Menteri..... | 52 |
| 4. Program PKBL di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan..... | 59 |
| 5. Proses Pengajuan Program Kemitraan | 68 |
| 6. Tahapan Penerapan Program Bina Lingkungan | 70 |
| B. Pembahasan | 71 |
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 77 |
| A. Kesimpulan..... | 77 |
| B. Saran..... | 77 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 1.1. Realisasi Penyaluran program Kemitraan PT. Perkembunan Nusantara IV Medan Tahun 2016-2018 | 8 |
| Tabel 1.2. Persentase Selama 3 Tahun Terakhir Jumlah Mitra Binaan yang Diterima dari tahun 2016-2018 | 9 |
| Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu | 41 |
| Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian | 47 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1.1. Kerangka Berfikir | 44 |
| Gambar 4.1. Struktur Organisasi Perusahaan PTPN IV | 57 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengembangkan pertumbuhan perekonomian nasional, pemerintah sangat mengharapkan partisipasi usaha swasta. Sebagai salah satu langkah kebijakannya, pemerintah memusatkan perhatiannya pada pembinaan dan pengembangan sektor usaha swasta dalam skala kecil dan menengah, karena keberhasilan sektor ini dapat dijadikan salah satu landasan yang kuat menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional. Usaha kecil yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Sebagai lembaga keuangan yaitu membantu penyediaan modal dalam bentuk kredit dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi, bantuan penyediaan modal yang dibutuhkan tidak hanya diperoleh dari pihak perbankan saja, lembaga keuangan lainnya, seperti perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan milik Negara juga ikut berperan dalam memberikan bantuan modal usaha khususnya Usaha Mikro dan Koperasi berupa pinjaman dana sehingga dapat meningkatkan taraf hidup di kalangan pengusaha kecil, menengah dan koperasi dan mengurangi kesenjangan sosial sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis.

Dalam sistem pemberian kredit ini juga harus mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar

(*ability to pay*), hal-hal tersebut terdiri dari *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan) *collateral* (jaminan), *capital* (modal), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi).

PT. Perkebunan Nusantara IV merupakan salah satu anak perusahaan BUMN yang mana oleh pemerintah diwajibkan melakukan pembinaan terhadap usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sesuai dengan peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, selain itu berdasarkan 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, disamping melakukan pembinaan usaha kecil, BUMN dapat pula menyisihkan sebagian labanya untuk keperluan pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2017.

Pelaksanaan pembinaan usaha Kecil oleh BUMN mulai tertata setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/KMK.013/1989. Pada saat itu Program ini dikenal dengan nama Pegelkop (Pembinaan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi) dan pada tahun 1994 dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.316/KMK.016/1994. Nama program diganti menjadi program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi). Seiring dengan berkembang kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-09/MBU/07/2015

tanggal 3 Juli 2015 nama program diganti menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

Dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, khususnya Program Kemitraan merupakan kegiatan yang membantu pembinaan usaha swasta dan koperasi berskala kecil melalui penyaluran pinjaman dana, dan penyaluran dana Pembinaan Kemitraan dari Program Kemitraan. Dana ini digunakan khusus untuk membantu para pengusaha kecil menengah dan koperasi agar usaha mereka berjalan lancar, semakin berkembang dan maju. PKBL berpotensi besar untuk menjadi salah satu jembatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program Kemitraan (PK) disalurkan dalam bentuk pendampingan dan kredit lunak bagi UMKM yang belum bankable, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang bankable. Peraturan menteri negara BUMN No: Per/05/MBU/2007 menyatakan bahwa program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dan dari bagian BUMN. Dana program kemitraan digunakan sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat melalui pinjaman lunak, sedangkan Bina Lingkungan (BL) digunakan sebagai pemberdaya kondisi sosial seperti bantuan bencana alam, bantuan pendidikan, pelatihan kesehatan, sarana ibadah, sarana umum dan pelestarian alam

Keberhasilan sebuah perusahaan selain dinilai dari kinerja keuangan perusahaan juga dinilai dari sejauh mana perusahaan tersebut menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan kesadaran bahwa perusahaan hanya akan dapat tumbuh

secara berkelanjutan apabila masyarakat disekitarnya dapat lebih sejahtera dan mandiri.

Dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, khususnya Program Kemitraan merupakan kegiatan yang membantu pembinaan usaha swasta dan koperasi berskala kecil melalui penyaluran Pinjaman Dana, Dana yang disalurkan berdasarkan pengajuan Proposal Bantuan Dana oleh calon Mitra Binaan sesuai dengan dana pinjaman yang calon mitra binaan perlukan, contohnya sebesar Rp. 50.000.000 dengan agunan yang telah disediakan oleh calon mitra binaan. Adapun Persentase Kolektibilitas Macet dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persentase Kolektibilitas Macet pada Program PKBL PTPN IV
Medan 2016-2018

| Tahun | Total Dana Tersalur | Jumlah Kredit Macet | Persentase |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 2016 | 11.955.000.000 | 3.170.000.000 | 26,52% |
| 2017 | 8.180.000.000 | 1.180.000.000 | 14,42% |
| 2018 | 11.120.447.078 | 4.000.220.078 | 35,97% |

Sumber: PTPN IV Unit PKBL.

Persentase Kolektibilitas macet pada program PKBL pada PTPN IV Medan. Mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2016 hingga 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa Mitra PT. Perkebunan Nusantara IV Medan mengalami penurunan kemampuan dalam pengembalian dana PKBL.

Menurut (Sari, Syam and Ulum, 2012) Jika tingkat kredit macet semakin lama semakin meningkat, maka tingkat profitabilitas pasti terganggu.

Dengan adanya kredit bermasalah perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi perusahaan (Lukman dendawijaya, 2005)

(goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, 2019) Apabila terjadi risiko kemacetan pinjaman akan menghambat program pemberian bantuan pinjaman kepada mitra binaan yang lain karena dana hasil pengembalian akan disalurkan kembali untuk pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi lainnya (dana bergulir).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan peninjauan langsung dengan melakukan penelitian tentang permasalahan dengan judul: **“Analisis Sistem Pemberian Pinjaman Dana Kepada Mitra Binaan Oleh Bagian Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menemukan dan mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Meningkatnya jumlah kredit Macet ditahun 2018
2. Terjadi peningkatan persentase jumlah kolektibilitas Kredit Macet pada program PKBL tahun 2016-2018

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberian dan Penyaluran Pinjaman Dana Kemitraan oleh Bagian Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), Medan.
2. Mengapa tingkat Kolektibilitas macet mengalami peningkatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian dan Penyaluran Pinjaman Dana Kemitraan oleh Bagian Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara IV Medan Periode 2016-2018
- b. Untuk mengetahui tingkat kolektibilitas macet yang mengalami peningkatan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana kaitan antara teori dengan penerapannya dalam praktek lapangan atau dengan pelaksanaan yang sebenarnya. Dan penulis dapat mengembangkan ilmu akuntansi, khususnya pada laporan keuangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penulis. Selain itu, dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi pihak lain yang melakukan penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

- c. Dapat dijadikan bahan masukan serta tambahan informasi untuk lebih memajukan perusahaan kedepannya khususnya di bagian PKBL.
- d. Dapat memberikan perbaikan kepada perusahaan agar lebih meningkat lagi kinerja perusahaan untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan.
- e. Bagi pembaca di harapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pinjaman atau Kredit

a. Pengertian Pinjaman Atau Kredit

Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu (Wijaya and Irawan, 2018).

Peminjam awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam dapat juga memperoleh batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman.

Dalam bahasa latin kredit disebut “*Credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.

(Wulandari, 2016) Kredit merupakan penyerahan, barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji dengan membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak

Sedangkan bagi sipenerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehinggal mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut

sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pengertian kredit menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan jalan mempermudah perijinan-perijinan sebagai landasan utama berguna bagi dunia usaha serta mendorong pertumbuhan wirausaha diseluruh lapisan masyarakat Dengan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat diharapkan dapat menanggulangi permasalahan di Indonesia dalam perekonomian yaitu kemiskinan dan pengangguran. Serta menjadikan masyarakat lebih kompetitif untuk mengembangkan usahanya sehingga akan muncul banyak kesempatan kerja (Orlando and Susanto, 2019)

b. Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit harus diperhatikan dalam pemberian fasilitas kredit terdapat lima unsur yaitu:

1. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi sipemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit di kucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran

kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian surat kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

c. Tujuan dan Fungsi Kredit

Perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi dan pengamatan kredit. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi sekaligus untuk

menjaga keamanan untuk nasabah penyimpan. Sedangkan fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalulintas uang
4. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
6. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
7. Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

d. Prosedur Pemberian Kredit

(Ipb, 2003) yang dimaksud prosedur adalah urutan kredikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1) Pengajuan proposal

Dalam pengajuan proposal hendaknya berisi keterangan tentang:

- a) Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus, berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.
- b) Tujuan pengambilan kredit
- c) Besarnya kredit dan jangka waktu

d) Cara pemohon mengembalikan kredit, maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lain.

e) Jaminan kredit, kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat, selanjutnya proposal ini dilampirkan dengan berkas-berkas yang telah di persyaratkan seperti:

1. Akte pendirian perusahaan
2. Bukti diri berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk)
3. T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)
4. N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak)
5. Neraca dan Laporan rugi laba 3 tahun terakhir
6. Photo copy sertifikat yang dijadikan jaminan
7. Daftar penghasilan bagi perseorangan
8. Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan

f) Penyelidikan Berkas

Menyelidiki dokumen yang diajukan pemohon kredit apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

g) Penilaian kelayakan kredit

Adapun aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Aspek hukum
2. Aspek pasar dan pemasaran
3. Aspek keuangan

4. Aspek teknis atau operasi
5. Aspek manajemen
6. Aspek ekonomi nasional
7. Aspek AMDAL (Analisis dampak lingkungan terhadap darat, air, dan uadar sekitarnya)

h) Wawancara pertama

Merupakan tahap penyidikan kepada calon peminjam dengan berhadapan langsung dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap dengan yang diinginkan.

i) Peninjauan ke lokasi (*on the spot*)

Tujuan peninjauan lokasi adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis di proposal

j) Wawancara kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah *on the spot* dilapangan.

k) Keputusan kredit

Menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit mencakup:

1. Akad kredit yang akan ditandatangani
2. Jumlah uang yang akan diterima
3. Jangka waktu kredit
4. Biaya-biaya yang harus dibayar

l) Penandatanganan Akad Kredit

Dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris

m) Realisasi Kredit

Yaitu pengambilan dana sebagai realisasi dari pemberian kredit yang diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, dan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap

n) Penyaluran atau penarikan dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit.

2. Dana

a. Pengertian Dana

Dana adalah uang Tunai dan/atau aktiva lainnya yang yang segera dapat diuangkan dan yang bersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu (tim penyusun kamus besar Indonesia).

Pengertian Dana menurut (Kasmir, 2014) mengemukakan bahwa:

- 1) Dana dianggap sebagai kas
- 2) Dana dianggap sebagai uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau tabungan
- 3) Dana dianggap sebagai modal kerja
- 4) Dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan
- 5) Dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan kas.

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa dana adalah sejumlah uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang disisihkan untuk kepentingan atau tujuan tertentu.

DAU adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi (Harahap, 2011).

3. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

a. Pengertian Program Kemitraan Bina Lingkungan

Melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Pembentukan PKBL berdasarkan:

- 1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER/02/MBU/07/2017 Tanggal 05 juli 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri badan usaha milik negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan badan usaha milik negara.
- 2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara: PER-03/MBU/12/2016 Tanggal 16 desember 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri badan usaha milik negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan badan usaha milik negara.
- 3) Peraturan Menteri badan usaha milik negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tanggal 03 juli 2015 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan badan usaha milik negara.

Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan usaha kecil sebagai mitra binaan agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan

taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (Kaunang, Sabijono and Wangkar, 2017).

Salah satu penyaluran dana untuk membantu usaha mikro yang namun jarang digunakan di Indonesia adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL di mulai tahun 1994, dana PKBL adalah dana yang didapat dari penyisihan 1-2 persen laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana ini kemudian dibagi lagi kedalam dua jenis, yaitu: pinjaman dan pembinaan. Dalam pengolahan dana PKBL terdapat masalah-masalah yang ada di dalam penyalurannya banyak disalah gunakan oleh mereka yang ingin mencari dana dengan persyaratan yang relatif mudah.

Berdasarkan KEP2361MBU/2003 yang merupakan peraturan yang keluar dikarenakan peraturan sebelumnya belum dapat tercapai maka unit program kemitraan sekurang kurangnya melakukan fungsi pembinaan, evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi, fungsi administrasi dan keuangan. Beberapa permasalahan yang ada, yaitu: sumber daya manusia, baik dalam masalah jumlah dan keahlian, biasanya pegawai BUMN yang ditetapkan di PKBL bukanlah orang perbankan yang memang keahliannya menganalisa prospek bisnis dan resiko pinjaman. Lebih jauh dengan tidak adanya peraturan yang jelas mengenai kepada siapa dana harus disalurkan maka yang terjadi adalah penyaluran pinjaman diberikan untuk berbagai bidang, padahal memberi pinjaman kepada sebuah sektor memiliki perlakuan yang berbeda dengan sektor lainnya.

Sedangkan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 yang menjelaskan tentang pedoman penyusunan laporan keuangan PKBL dan menjelaskan pula tentang kemitraan merupakan program untuk meningkatkan

kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman modal usaha maupun pembelian perangkat penunjang produksi agar usaha kecil menjadi Tangguh dan mandiri. Program kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk pembiayaan, modal kerja, pinjaman khusus yang biasanya bersifat jangka pendek dan hibah untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi serta penelitian melalui pemanfaatan dana dari bagian dana BUMN (Pedoman Akuntansi PKBL).

b. Tujuan dan Manfaat Program Kemitraan Bina Lingkungan

Program Kemitraan (PK) adalah program yang diberikan dalam bentuk pinjaman (dana bergulir) untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan untuk usaha-usaha kecil menengah atau mikro yang dibangun oleh masyarakat. Program kemitraan ini tentunya masuk terhadap unit-unit ekonomi skala mikro yang berusaha mengalokasikan sumberdaya ekonomi yang terbatas untuk mampu mengoptimalkan tingkat pemuasan kebutuhannya. Tujuan Program Kemitraan antara lain:

- 1) Membantu Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) dan Koperasi yang sudah berjalan agar dapat berkembang dan mandiri.
- 2) Mendorong kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta terciptanya pemerataan pembangunan, melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha.
- 3) Meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap pembinaan masyarakat dan lingkungan, terutama disekitar daerah operasional perusahaan.

Selain itu kelebihan dari PKBL sendiri adalah memberikan kredit dengan persyaratan yang mudah, memberikan pembinaan artinya setiap usaha yang meminjam dana ke PKBL dapat mengajukan permohonan pelatihan bila dirasa perlu untuk meningkatkan usahanya. Pinjaman yang diberikan berkisar dari 10 juta hingga 100 juta, bahkan ada beberapa BUMN besar yang memberikan hingga 200 juta. Rata-rata pinjaman adalah dua tahun dengan tingkat bunga 6 persen pertahun. Sebetulnya bunga ini sering disebut oleh para staff PKBL sebagai fee karena nilainya yang sebetulnya sangat rendah (Sari and Fransisca, 2018).

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER09/MBU/ 07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/ MBU/ 12/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1928).

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
5. Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.
6. Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Kemitraan Bina Lingkungan

(FITRIANI, 2013) Faktor pendorong dalam partisipasi dalam program kemitraan adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor pendorong dari Mitra Binaan Ada beberapa kondisi yang menumbuhkan partisipasi mitra binaan untuk terlibat dalam program kemitraan, baik sebelum ikut dalam program kemitraan dan saat ikut program kemitraan yaitu :
 - a) Mengembangkan usaha
 - b) Persyaratan mudah
 - c) Adanya manfaat yang didapat ketika mengikuti pembinaan dari program kemitraan ini.

- 2) Faktor pendorong dari Perusahaan Adapun faktor pendorong dari perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a) Pendekatan kepada masyarakat
 - b) Komunikasi yang baik dari petugas

d. Pengungkapan/Pengukuran Program Kemitraan Bina Lingkungan

Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN (PERMEN BUMN) No: Per-09/MBU/07/2015 tanggal 3 juli 2015 nama program diganti menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (disingkat PKBL). Berdasarkan peraturan tersebut dana program kemitraan bersumber dari:

1. Penyisihan laba setelah pajak yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pengesahan laporan tahunan BUMN pembinaan untuk program kemitraan dan program Bina lingkungan maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.
2. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan jasa giro dari dana program kemitraan.
3. Hasil bunga deposito dan jasa giro dari dana program kemitraan bina lingkungan yang ditempatkan.
4. Sumber lain yang sah.
5. Sisa dana Program Kemitraan dan Program BL tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya.

6. Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak, disetorkan kerekening dana Program Kemitraan dan Program BL selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana.
7. Dana Program Kemitraan dan Program BL hanya dapat ditempatkan pada deposito dan/atau jasa giro pada Bank BUMN.
8. Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

(Chrismardani, 2014) UMKM adalah suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan ini tentu saja akan lebih berkembang dengan baik dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik sehingga dapat bersaing dengan pasar internasional.

UKM juga hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, yang antara lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang masih belum mampu mendorong tumbuh kembangnya UKM ke arah yang lebih baik (Sukma Lesmana, 2009).

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Adapun kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Fitria and Jurana, 2016)

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha besar. Adapun kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha

Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(Saragih and Surikayanti, 2015) Usaha kecil dan menengah pada umumnya masih menerapkan akuntansi yang sederhana tanpa melihat standar akuntansi yang baik dan benar. Dan masalah akan timbul jika penerapan akuntansi tidak dilakukan secara baik dan benar, apalagi jika memang tidak ada penerapan akuntansi sama sekali. Sehingga akan membuat pemilik UKM akan menetapkan keputusan dengan cara memperkirakan tanpa memiliki dasar yang kuat untuk keputusannya sendiri.

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Badan pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha mikro merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja sampai dengan 19 orang.

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,00.

Ciri-ciri usaha Mikro:

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti

- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- 4) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah
- 5) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- 6) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha
- 7) Yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

b. Jenis dan Bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kegiatan perusahaan pada prinsipnya dapat dikelompokkan dalam tiga jenis usaha, yaitu:

1) Jenis usaha perdagangan distribusi

Jenis usaha ini merupakan usaha yang terutama bergerak dalam kegiatan memindahkan barang dan produsen ke konsumen atau dari tempat yang mempunyai kelebihan persediaan ke tempat yang membutuhkan. Jenis usaha ini diantaranya bergerak dibidang pertokoan, warung, rumah tangga, peragenan (*fisial*), penyalir (*whole saler*), perdagangan perantara, tengkulak, dan sebagainya.

Komisioner dan makelar dapat juga dimasukkan dalam kegiatan perdagangan karena kegiatannya dalam jual beli barang.

a) Jenis usaha produksi

Industri adalah jenis usaha yang terutama bergerak dalam kegiatan proses pengubahan suatu bahan/barang menjadi bahan/barang lain yang berbeda bentuk atau sifatnya dan mempunyai nilai tambah. Kegiatan ini dapat berupa produk/industri pangan, pakaian, peralatan rumah tangga, kerajinan, bahan bangunan, dan sebagainya. Dalam hal ini, kegiatan dalam budidaya sektor pertanian/perikanan/peternakan/perkebunan dan kegiatan penangkapan ikan termasuk jenis usaha produksi.

b) Jenis usaha komersial

Usaha jenis komersial merupakan usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa sebagai utamanya. Contoh jenis usaha ini adalah asuransi, bank konsultan, biro perjalanan, pariwisata, pengiriman barang (ekspedisi), bengkel, salon

kecantikan, penginapan, gedung bioskop, dan sebagainya, termasuk praktek dokter dan perencanaan bangunan.

c. Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UU No.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa Usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Dalam membangun tipologi untuk tahap-tahap industri suatu Negara kontribusi industri kecil diawali dari IKRT (industri kecil rumah tangga) yang bergerak dalam industri garmen, sepatu, kerajinan tangan, maupun makanan yang bahan bakunya dari sektor pertanian.

Mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan (Suci, Tinggi and Ekonomi, 2017)

Usaha mikro memiliki peran komplementer dengan perusahaan besar dalam penciptaan kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi.

Peran usaha Mikro dalam perekonomian Indonesia adalah:

- 1) Usaha Mikro merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di indonesia.
- 2) Penyediaan kesempatan kerja

- 3) Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat.
- 4) Penciptaan pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitas atas keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan.
- 5) Memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non migas.

Pentingnya peranan usaha mikro di Indonesia terkait dengan posisinya yang strategis dalam berbagai aspek, yaitu:

1) Aspek permodalan

Usaha mikro tidak memerlukan modal yang besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit perusahaan besar.

2) Tenaga kerja

Tenaga kerja yang diperlukan usaha ini tidak menuntut pendidikan formal atau tinggi Lokasi

Sebagian besar usaha mikro beralokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar.

3) Ketahanan

Peranan usaha mikro ini telah terbukti bahwa usaha mikro memiliki ketahanan yang kuat (strong survival) ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi

Usaha mikro memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi yang ditunjukkan oleh sejumlah indikator sebagai berikut:

- 1) Ketika pertumbuhan ekonomi mencapai 4,8% tahun 2000 dimana usaha besar (UB) belum bangkit, banyak pakar memperkirakan hal tersebut kontribusi dari usaha mikro selain dari sektor konsumsi.
- 2) Hasil survei 1998 ketika awal krisis terhadap 225 ribu usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa hanya 4% saja usaha mikro dan kecil menghentikan bisnisnya, 64% tidak mengalami perubahan omzet, 31% omzetnya menurun, dan bahkan 1% justru berkembang.
- 3) Technical assistant ADB pada tahun 2001 juga melakukan survei terhadap 500 usaha mikro dan kecil di Medan dan Semarang yang memberikan hasil bahwa 78% usaha mikro kecil menjawab tidak terkena dampak krisis moneter.

(Utama, 2013) setidaknya ada lima aspek utama yang menjadi alasan mengapa usaha mikro memiliki peran strategis, yaitu:

- 1) Aspek manajerial yang meliputi peningkatan produktivitas/ omzet/ tingkat utilitas/ tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Aspek permodalan yaitu meliputi bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit.
- 3) Pengembangan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem Bapak- anak angkat, PIR, keterkaitan hulu hilir (*forward*

linkage), keterkaitan hilir hulu (*backward linkage*), modal ventura, atau subkontrak.

- 4) Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK (pemukiman industri kecil), LIK (lingkungan industri kecil), SUIK (sarana usaha industri kecil) yang didukung UPT (unit pelayanan teknis) dan TPI (tenaga penyuluhan industri).
- 5) Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (kelompok usaha bersama), Kopinkra (koperasi industri kecil dan kerajinan).

B. Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan penelusuran penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruang yang akan diteliti yang dapat diteliti dalam ruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang berhasil dipilih untuk dikedepankan dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian / peneliti / Tahun | Metode Penelitian dan Alat Analisis | Hasil dan Pembahasan |
|----|---|---|---|
| 1 | Analisis bantuan kredit dari program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung emas | Variabel dependen: efektivitas, variabel independen: modal produksi, omzet penjualan, tenaga kerja (jam kerja), keuntungan. | Bahwa mitra binaan yang telah diberikan kredit mengalami perkembangan, ini dapat dilihat dari peningkatan laba, dan berani bersaing di pasar global melalui |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | semarang terhadap perkembangan Usaha Mikro kecil di kota Semarang | Alat analisis: Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Validitas, Uji Statistik pangkat tanda Wilcoxon | promosi-promosi dan pameran yang digelar atau yang diadakan oleh pihak PT. Pertamina (persero) Unit pemasaran I Medan |
| 2 | Pengaruh pemberian kredit terhadap perkembangan usaha dan menengah pada program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) PT.Pertamina (Persero) unit pemasaran 1 Medan. | Metode deskriptif | Mitra binaan PT. Pertamina (Persero) Unit pemasaran I Medan mengalami perkembangan usaha, ini dilihat dari kenaikan laba setelah menerima kredit dari PT. Pertamina (Persero) Unit pemasaran I Medan. |
| 3 | Analisis pemberian kredit program kemitraan bina Lingkungan di PT. Jasaraharja persero sulut | Metode deskriptif, | Jangka waktu atau masa pembinaan untuk mitra binaan tersebut menjadi tangguh, mandiri, dan bankable. Beban pembinaan bersifat hibah dan ditetapkan maksimal 20% dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan. |
| 4 | Analisi efektivitas program kemitraan dan bina lingkungan PT. Industri kereta api (INKA) Persero pada UMKM. | Uji Validitas, Uji Reliabilitas, | Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai efektivitas program kemitraan dan bina lingkungan PT. INKA (Persero) pada UMKM, maka diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas program kemitraan dan Bina Lingkungan PT. INKA (Persero), dari segi realisasi ketercapaian tujuan program, secara keseluruhan tujuan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | program dapat dikatakan efektif. Dan program yang paling tinggi efektivitasnya adalah program pinjaman lunak. |
|--|--|--|---|

C. Kerangka Berfikir

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan memiliki Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, program yang diberikan dalam bentuk pinjaman (dana bergulir) untuk membiayai modal kerja atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan untuk usaha-usaha kecil menengah atau mikro yang dibangun oleh masyarakat. Program kemitraan ini tentunya masuk terhadap unit-unit ekonomi skala mikro yang berusaha mengalokasikan sumberdaya ekonomi yang terbatas untuk mampu mengoptimalkan tingkat pemuasan kebutuhannya.

Mitra Binaan adalah usaha kecil dan koperasi yang mendapatkan pinjaman dari program Kemitraan. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh PKBL Pembina, Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib, Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada PKBL Pembina.

Tahap pengajuan proposal adalah calon mitra binaan menyampaikan rencana atau proposal kegiatan usaha kepada bagian PKBL, dengan melampirkan dokumen yang telah lengkap.

Tahap proses Administrasi adalah Pada tahap ini PKBL akan memberikan kapan kredit tersebut dapat direalisasikan. Calon debitur harus menandatangani akad/persetujuan. Pada saat itulah PKBL akan melakukan administrasi kredit dalam arti luas. Selanjutnya PKBL melalui bagian atau pejabat-pejabat yang menanganinya menata kredit tersebut melalui penyimpanan/pemberkasan dokumen-dokumen kredit, surat-surat yang berkenaan dengan agunan.

Tahap survei adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai, dan lengkap dengan yang diinginkan.

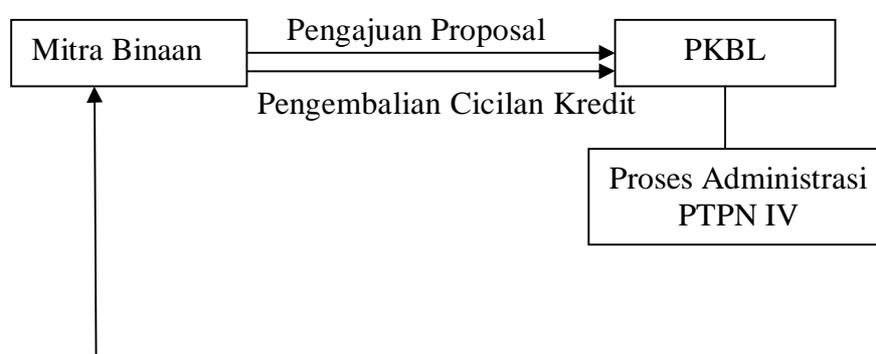
Tahap penerimaan/penolakan adalah setelah dilakukannya survei menetapkan diterima atau ditolaknya pinjaman tersebut sesuai dengan objek yang telah disurvei.

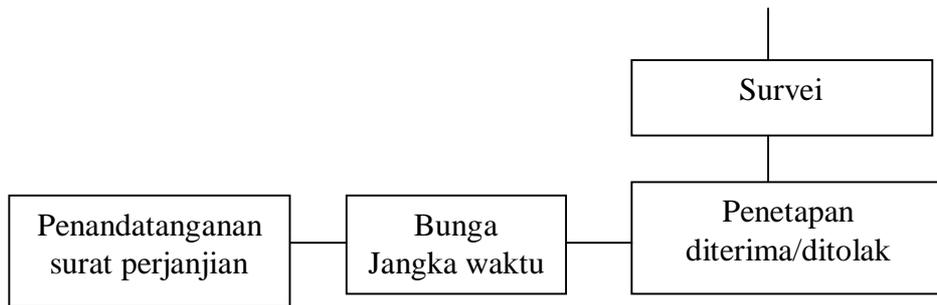
Tahap bunga jangka waktu adalah tahap yang dilakukan ketika mitra binaan diterima dalam melakukan pinjaman kepada PKBL, Dan pihak PKBL tersebut menentukan besarnya bunga pokok pinjaman tersebut.

Tahap perjanjian adalah pada tahap perjanjian kredit ini, calon mitra binaan telah resmi menjadi calon mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

Tahap pengembalian adalah Pengembalian pinjaman dana bergulir dilakukan setiap bulannya oleh mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang dibayarkan langsung ke rekening Unit CDC PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

Berikut Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif pada penelitian ini menggambarkan karakteristik variabel penelitian yang hanya mengumpulkan, menyusun dan mengklasifikasikan dan menafsirkan data sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai sistem pemberian pinjaman dana kepada mitra binaan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

B. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan. Defenisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sistem pemberian pinjaman Dana

Sistem pemberian pinjaman dana kepada mitra binaan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pinjaman yang di tuangkan dalam proposal, yang dilampiri berkas-berkas yang dibutuhkan.

Ada beberapa indikator pengukuran untuk mengukur pemberian pinjaman dana yaitu:

- a. Penilaian masyarakat sekitar terhadap calon debitur.
- b. Besar nilai transaksi jaminan sebanding dengan besarnya pinjaman.

- c. Jumlah modal usaha selain dari pinjaman.
- d. Jangka waktu pengembalian pinjaman.

2. Program Kemitraan Bina Lingkungan

Program Kemitraan Bina Lingkungan adalah program yang diberikan dalam bentuk pinjaman (dana bergulir) untuk membiayai modal kerja atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan untuk usaha-usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau mikro yang dibangun oleh masyarakat.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang beralamat di Jalan Letnan Jendral Soeprapto No.2 Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini dijadwalkan pada bulan Juli 2019 s/d Oktober 2019, dengan metode penulisan tugas akhir ini, penulis akan melakukan metode-metode terapan yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk lebih jelasnya kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.1
Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

| No | Kegiatan | Bulan/Minggu | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|------------|---|---|---|
| | | Juli'19 | | | | Agust'19 | | | | Sept'19 | | | | Oktober'19 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengumpulan Data | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penulisan Proposal | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 4 | Bimbingan Proposal | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 5 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| 6 | Penulisan Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| 7 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data yang diperoleh langsung dengan wawancara kepada Mitra Binaan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

2. Sumber data

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data tersebut telah disediakan telah diolah oleh perusahaan yang berupa data penyaluran dana mitra binaan. Yang di peroleh dari PT.Perkebunan Nusantara IV selama periode 2016-2018.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan kepala PKBL, dan administrasi PKBL PT.Perkebunan Nusantara IV Medan.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi perusahaan.

Adapun Tahapan-tahapan dalam mengamati observasi yaitu:

1. Menentukan objek apa yang akan diobservasi
2. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi.
3. Menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun sekunder
4. Menentukan dimana tempat objek yang akan diobservasi
5. Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar.
6. menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi, menggunakan buku catatan, video perekam, dan alat-alat tulis lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilaksanakan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penganalisaan data primer dan sekunder yang dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga menghasilkan keterangan yang lengkap sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis mengambil hasil kesimpulan analisis yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut: menganalisa sistem pemberian pinjaman dana kepada mitra binaan oleh bagian program kemitraan dan bina lingkungan oleh bagian PKBL di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data) yaitu merangkum memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Misal pada bidang prosedur dan sistem pemberian pinjaman, setelah peneliti memasuki perusahaan tempat penelitian, maka dalam mereduksi data, peneliti akan memfokuskan pada prosedur dan sistem pemberian pinjaman, dengan mengkatagorikan pada aspek tahap permohonan, syarat pengajuan pinjaman, analisa kelayakan pinjaman dan pengawasan setelah pinjaman diberikan.
2. *Data Display* (penyajian data) yaitu mendisplay data artinya menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dan sebagainya. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.
3. *Conclusion Drawing/Verification*, Langkah terakhir dari model ini artinya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

PT. Perkebunan Nusantara IV yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1996 merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan perkebunan di wilayah Sumatera Utara yaitu PT. Perkebunan VI, PT. Perkebunan VII dan PT. Perkebunan VIII. Pendirian PTPN IV disahkan berdasarkan Akta Notaris Harun Kamil. SH. Nomor 37 tertanggal 11 Maret 1996, dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2.8332.HT Tahun 96 tanggal 8 Agustus 1996 serta dicantumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 81 tanggal 8 Oktober 1996.

Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan organisasi dan anggaran dasar. Perubahan terakhir berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan berdasarkan Akta para pemegang saham PTPN IV Nomor 25 tanggal 23 Oktober 2014 maka kedudukan PTPN IV yang merupakan BUMN sejak Peraturan ini diterbitkan berubah menjadi anak perusahaan BUMN.

PTPN IV memiliki 33 Unit Usaha yang terletak di 9 Kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Serdang Bedagai, Simalungan, Batubara, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas dan Mandailing Natal.

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV berpedoman pada:

- a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/07/2017 Tanggal 05 Juli 2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tanggal tentang program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- b. Peraturan menteri badan usaha milik negara nomor: PER-03/MBU/12/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Tentang Perubahan atas peraturan menteri badan usaha milik negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tanggal 03 Juli 2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

2. Dana Program Kemitraan yang Disalurkan Berdasarkan Peraturan Menteri oleh Bagian PKBL

1. Penyisihan laba setelah pajak yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pengesahan laporan tahunan BUMN pembinaan untuk program kemitraan dan program Bina lingkungan maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.

2. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan jasa giro dari dana program kemitraan.
3. Hasil bunga deposito dan jasa giro dari dana program kemitraan bina lingkungan yang ditempatkan.
4. Sumber lain yang sah.
5. Sisa dana Program Kemitraan dan Program BL tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya.
6. Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak, disetorkan kerekening dana Program Kemitraan dan Program BL selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana.
7. Dana Program Kemitraan dan Program BL hanya dapat ditempatkan pada deposito dan/atau jasa giro pada Bank BUMN.
8. Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. Proses Pengajuan Program Kemitraan

Proses pengajuan program kemitraan diperoleh melalui kegiatan hasil wawancara dengan Bapak Zulliadi Nasution selaku Staf Sub Unit Program Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, sebagai data pendukung didapat data mengenai proses pengajuan dan penyaluran Kredit Kemitraan BUMN (KKB) yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Tahapan dalam penyaluran KKB ini adalah pertama, pengajuan KKB dapat dilakukan secara langsung oleh pribadi/ orang-perorangan ataupun melalui

lembaga/instansi yang memiliki mitra binaan dengan melengkapi persyaratan untuk Kredit Kemitraan BUMN (KKB), yaitu meliputi :

- a) Pasfoto pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar (suami/istri)
- b) Fotocopi KTP yang masih berlaku (suami/istri)
- c) Fotocopi Kartu Keluarga pemohon
- d) Foto usaha sebanyak 2 lembar ukuran 5 inchi
- e) Fotocopi SITU, SIUP, TDUP, NPWP dan atau minimal surat keterangan usaha dari lurah setempat
- f) Fotocopi buku tabungan/rekening bank yang masih berlaku
- g) Fotocopi agunan yang akan dijaminkan
- h) Sertifikat Hak Milik
- i) Denah lokasi usaha
- j) Surat pernyataan (bermaterai) tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN Pembina lain
- k) Surat Permohonan (bermaterai).

Persyaratan dari berkas kelengkapan data di atas merupakan bagian dari persyaratan awal yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan Kredit Kemitraan BUMN. Setelah persyaratan pertama dilengkapi, barulah memasuki tahapan kedua, yakni meliputi kegiatan survei dan verifikasi awal. Pihak PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang diwakili oleh *credit analist* melakukan survei dan verifikasi awal mengenai data-data yang disampaikan calon mitra binaan agar dapat dikaji kelayakan pemberian penyaluran dana KKB jumlah *credit analist* PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Pada tahapan ini seorang

credit analyst melihat kecocokan data-data yang disampaikan calon mitra binaan dengan fakta di lapangan.

Tahapan yang ketiga adalah analisa data, tujuan dilakukannya tahapan ini adalah untuk mengetahui dapat atau tidaknya calon mitra binaan diberikan/disalurkan dana KKB dan jika diberikan kredit apakah calon mitra binaan dapat mengembalikan dana yang telah diberikan dengan tepat waktu. Tahapan ini dilakukan dengan menganalisa tentang kemampuan membayar (*repayment capacity*) mitra binaan/nasabah yang dapat dilihat dari *progress* dan keadaan tiga tahun ke belakang usaha calon mitra binaan. Dalam tahap ketiga ini, apabila hasil analisa data ini menyatakan bahwa usulan calon mitra binaan disetujui, maka dituangkan ke dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) dan diserahkan kepada wakil pimpinan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan untuk proses persetujuan. Perlu diketahui untuk menerima proposal kredit kemitraan BUMN, PT. Perkebunan Nusantara IV Medan pun harus yakin bahwa calon mitra binaan dapat dipercaya menggunakan dana Program Kemitraan. Yakin tidaknya dapat dilihat dari *repayment capacity* calon mitra binaan dan manajemen usahanya. Setelah disetujui oleh Wakil Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, maka dapat dibuat perjanjian KKB antara PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sebagai pihak kreditur dan mitra binaan sebagai pihak debitur. Setelah perjanjian tersebut selesai dibuat, pihak debitur diharuskan membuka rekening tabungan di Bank Mandiri. Pembukaan rekening tabungan dimaksudkan untuk memudahkan penyaluran dana dari kreditur kepada debitur. Bunga kredit dalam KKB ini adalah sebesar 9 % (sembilan persen).

Setelah dana/pinjaman tersebut disalurkan, maka barulah *credit analyst* melakukan pemantauan kepada debitur setiap enam bulan (walau dalam SOP PKBL ditentukan untuk pemantauan dan pembinaan dilaksanakan setiap setahun sekali), Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yaitu:

- 1) Mengetahui kelancaran operasional usaha debitur;
- 2) Mengantisipasi kendala-kendala yang timbul dalam usaha debitur;
- 3) Meminimalisir risiko kredit menjadi bermasalah;
- 4) Melihat apakah peruntukan fasilitas kredit tepat guna dan tepat sasaran.

Pemantauan dari pihak kreditur (PT. Perkebunan Nusantara IV Medan) sekaligus sebagai salah satu bentuk pembinaan kepada debitur/mitra binaan. Salah satu tugas *credit analyst* adalah bertanggung jawab penuh atas usaha debitur sekaligus sebagai konsultan usaha bagi debitur sehingga *credit analyst* harus memantau, membina dan mengawasi usaha debitur dan lunasnya piutang yang dimiliki kreditur (PT. Perkebunan Nusantara IV Medan) dengan tepat waktu.

Hasil dari kegiatan kunjungan yang dilakukan dalam rangka pemantauan dan pembinaan ini dituangkan dalam *call memo*. Call memo merupakan hasil kerja dari petugas yang melakukan pemantauan dan pembinaan dalam penyaluran PK ini yang isinya dapat berupa tulisan, gambar, peta dan lain- lain terkait keadaan dari usaha mitra binaan. Apabila ditemukan kredit macet dan bermasalah, maka kredit tersebut ditangani untuk dicari penyelesaiannya yang representasi dari divisi itu di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Tim dari PKBL di PT Perkebunan Nusantara IV akan melakukan *reschedulling* dan

reconditioning sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam surat perjanjian pemulihan pinjaman *rescheduling* dan *reconditioning*. PKBL di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan berwenang menangani perihal untuk kredit individual dengan maksimum pinjaman sampai dengan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

4. Penerapan Sistem Program PKBL di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, khususnya Program Kemitraan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu dan membina usaha swasta dan koperasi berskala kecil melalui penyaluran pinjaman dana dan penyaluran dana, pembinaan kemitraan dari program kemitraan. Dana ini digunakan khusus untuk membantu para pengusaha kecil menengah dan koperasi agar usaha mereka berjalan lancar, semakin berkembang dan maju. Berdasarkan data temuan yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian yang meliputi kegiatan studi dokumenter yang berhubungan langsung dengan materi yang diteliti, diperoleh data sebagai berikut:

Acuan Dasar dalam penerapan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan diterapkan dengan mengikuti ketentuan *Standard Operating Prosedure* (SOP). Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang dicanangkan oleh Divisi Komunikasi Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. SOP PKBL

dikeluarkan karena adanya perintah Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV Medan agar dibuat SOP PKBL.

Tahapan dalam hal penerapan Program Bina Lingkungan dapat dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Afni Ria Safitri selaku kepala Sub Unit Program Kemitraan di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, didapat data mengenai tahapan penerapan Program Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Berikut hasil simpulan dari wawancara yang dilakukan di lapangan, meliputi :

Pelaksanaan suatu Program Bina Lingkungan dimulai dari adanya pengajuan usulan Program Bina Lingkungan. Pengajuan tersebut dapat datang dari masyarakat, Pemerintah Daerah setempat atau dari PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sendiri. Pada Program Bina Lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, prosesnya ada yang datang dari pengajuan masyarakat baik perorangan, Pemerintah Daerah, usulan dari PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dan perintah langsung dari PTPN IV Pusat.

Usulan Program Bina Lingkungan yang masuk ke PT. Perkebunan Nusantara IV Medan diproses dan dianalisa oleh unit pemasaran yang kemudian usulan tersebut diteruskan kepada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan Kantor Pusat di Jakarta melalui PT. Perkebunan Nusantara IV Medan untuk ditelaah. Unit Pemasaran di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, Unit PKBL memiliki tugas mengurus kredit dan dana di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Setelah proses tersebut PT. Perkebunan Nusantara IV Medan meneruskan hasil konfirmasi atas usulan Program Bina Lingkungan yang diajukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan lalu menyampaikan kepada pihak bersangkutan. Dalam hal usulan disetujui, maka dana akan disampaikan ke

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dan Kantor Cabang menyalurkan dana kepada yang bersangkutan. Penyaluran tersebut dana kepada yang berkepentingan (masyarakat/lingkungan) dan penyelenggaraan Program Bina Lingkungan tersebut dilaksanakan oleh Unit Pemasaran di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan karena Unit PKBL yang paling tepat melaksanakan, hal ini dikarenakan menyangkut perihal image dari PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sendiri.

Setelah Program Bina Lingkungan dilaksanakan, maka dibuat laporannya terkait penyelenggaraan program tersebut dalam jangka waktu satu minggu sampai dengan dua minggu dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang berisi realisasi dana dan berita acara program yang telah diselenggarakan disertai foto-foto pada saat program tersebut. PT. Perkebunan Nusantara IV Medan belum memiliki dropping dana rutin dalam penyaluran dana Program Bina Lingkungan, sehingga dalam penerapan penyaluran dana bina lingkungan menjadi kurang leluasa.

5. Sumber Dana Program Kemitraan

Prosedur penyaluran Program kemitraan pada PTPN IV mengacu pada Permen BUMN. Kesesuaian prosedur Program kemitraan dengan BUMN, Prosedur Program Bina Lingkungan PTPN IV telah mengacu dan sesuai dengan Permen BUMN. Namun PTPN IV seharusnya lebih memperhatikan penerapan dalam penyaluran PKBLnya, bukan hanya kesesuaian prosedurnya saja. Berikut di bawah ini perhitungan dari nilai persediaan realisasi penggunaan PK pada tingkat Efektivitas.

Tabel 4.1.
Dana Tersedian Dan Realisasi Penggunaan Pk Pada Tingkat Efektivitas

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sumber Dana | | | | |
| 1 | Saldo Awal | 6,901,185,070 | 988,802,763 | 465,336,681 |
| 2 | Alokasi laba | | | |
| 3 | Penerimaan Pendapatan | 8,873,155,551 | 10,414,419,357 | 11,593,353,153 |
| Jumlah sumber dana | | 15,774,340,621 | 11,403,222,120 | 12,058,689,834 |
| Jumlah penggunaan dana | | | | |
| 1 | Penyaluran kepada mitra binaan | 11,955,000,000 | 8,180,000,000 | 11,120,447,078 |
| 2 | Dana hibah | | 172.885.443. | 505.447.078. |
| Jumlah penggunaan dana | | 11,955,000,000 | 8,180,000,000 | 11,120,447,078 |
| Biaya Administrasi | | 20,537,858 | | |
| Saldo akhir | | | | |
| 1 | Pengembalian dana BUMN | | | |
| 2 | Biaya operasional | | | |
| 3 | Biaya jasa Administrasi | 20,537,858 | | |
| Saldo akhir | | 968,802,763 | 465,336,681 | 434,233,709 |
| Efektifitas | | 75.79% | 71.73% | 92.22% |

Sumber: PT Perkebunan Nusantara IV Bag. PKBL, 2019

Berdasarkan data tabel 4.1 di atas dapat dipahami bahwa Sumber dana program Kemitraan berasal dari alokasi saldo awal, alokasi laba, penerimaan dari BUMN Pembina, pengembalian pokok pinjaman, jasa administrasi, pendapatan jasa giro dan pendapatan lainnya. Pada awal tahun 2016 saldo awal sebesar Rp. 6.901.185.070 dan menurun ditahun 2017 sebesar Rp. 988.802.763 dan mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 465.336.681. Sedangkan untuk alokasi laba dari tahun 2016 sampai 2018 tidak ada. Sedangkan penerimaan pendapatan yang berasal dari penerimaan BUMN Pembina, pengembalian pokok pinjaman, jasa administrasi, pendapatan jasa giro dan pendapatan lainnya pada tahun 2016 Rp. 8.873.155.551, tahun 2017 meningkat sebesar Rp.

10.414.419.357 dan mengalami kenaikan kembali ditahun 2018 sebesar Rp. 11.593.353.153

Pada tahun 2016 jumlah sumber dana sebesar Rp. 15.774.340.621 kemudian disalurkan untuk program kemitraan sebesar Rp. 11.955.000.000 kepada 258 mitra binaan, jasa Administrasi sebesar Rp. 20.537.858

Pada tahun 2017 sumber dana sebesar Rp. 11.403.222.120 kemudian disalurkan untuk program kemitraan sebesar Rp. 8.180.000.000 kepada 132 mitra binaan, dana hibah sebesar 172.885.443.

Pada tahun 2018 sumber dana sebesar Rp. 12.058.689.834 kemudian disalurkan untuk program kemitraan sebesar Rp. 11.120.447.078 kepada 338 mitra binaan, dana hibah sebesar Rp. 505.447.078.

Tingkat efektifitas ditahun 2016 adalah 75,79% dari keseluruhan jumlah dana yang tersedia sebesar 75,79% disalurkan untuk program kemitraan. Pada tahun 2017 tingkat efektifitas menurun sebesar 71,73% dari keseluruhan jumlah dana yang tersedia sebesar 71,73% disalurkan untuk program kemitraan. Pada tahun 2018 tingkat efektifitas meningkat kembali sebesar 92,22%. Tingkat efektifitas bisa didapat dari jumlah penyaluran kepada mitra binaan dibagi dengan jumlah sumber dana dan dikalikan dengan 100% (penyaluran kepada mitra binaan / jumlah sumber dana x 100%).

6. Dampak dari PKBL dalam mengembangkan UMKM

Penyalahgunaan dana PKBL tidak saja dilakukan oleh BUMN tetapi juga oleh penerima. Tidak bermaksud menyalahkan masyarakat atau membuat generalisasi, tetapi berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, hal ini dapat menjadi pelajaran agar tidak terulang. Penyalahgunaan tersebut di antaranya proposal

fiktif, penggunaan anggaran yang tidak sama dengan yang ada di proposal, dan bahkan upaya penggelapan dengan alasan yang dibuat-buat. Mungkin karena banyak kasus seperti ini yang menyebabkan tim BUMN memprioritaskan orang-orang yang sudah mereka kenal. Tetapi, tentu saja jika mereka membuat generalisasi bahwa masyarakat seperti itu semua, tidak dapat dibenarkan juga. Perlu benar-benar disurvei oleh tim BUMN terhadap para calon penerima. Survei dari tim PKBL BUMN selama ini terkesan tidak serius, apalagi jika mensurvei daerah yang jauh dari perkotaan, daerah terpencil umumnya mereka tidak mau mensurvei, alasannya biaya survei bisa lebih mahal daripada bantuannya. Padahal justru daerah yang terpercillah yang harus diutamakan. Selain itu, di banyak acara-acara TV justru masyarakat desa yang kurang mampu umumnya tingkat kejujuran dan rasa terima kasihnya lebih tinggi daripada yang tinggal di perkotaan.

Dilihat dari perubahan dari aspek lainnya, perubahan terhadap modal usaha merupakan perubahan yang paling dirasakan oleh para pengusaha kecil. Hal ini dapat terjadi karena hampir seluruh pengusaha awalnya tidak memiliki sumber modal lain dan menggunakan Program Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan mereka mendapatkan bantuan pinjaman modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka. Rata-rata penggunaan pinjaman modal tersebut dialokasikan untuk menambah jumlah produksi, modal ini dirasa bermanfaat karena awalnya mereka biasa berhutang dengan orang lain, melalui bantuan modal tersebut tentu mereka tidak perlu berhutang dengan orang lain dan dapat membiayai produksi dengan uang sendiri.

7. Tingkat Kolektibilitas PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Pada analisis tingkat kesehatan program kemitraan tergantung pada tingkat kolektibilitas dari mitra binaan PTPN IV.

a. Kolektibilitas Program Kemitraan Tahun 2016

Tingkat kolektibilitas program Kemitraan pada PT. Perkebunan Nusantara IV pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Kolektibilitas Program Kemitraan Tahun 2016

| Kategorisasi | Nilai Pinjaman | Tingkat % | Nilai Pengembalian |
|----------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| Lancar | Rp. 7.361.000.000 | 100% | Rp. 7.361.000.000 |
| Kurang lancar | Rp. 989.000.000 | 75% | Rp. 741.750.000 |
| Ragu-ragu | Rp. 435.000.000 | 25% | Rp. 108.750.000 |
| Macet | Rp. 3.170.000.000 | 0% | 0 |
| Rata-rata terbilang | Rp. 11.955.000.000 | | Rp. 8.211.500.000 |

Berdasarkan tabel kolektabilitas pinjaman di atas dapat dijelaskan bahwa nilai kolektibilitas program kemitraan pada tahun 2016 dapat di hitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Kolektabilitas} &= \frac{\text{Rata - rata nilai kolektabilitas}}{\text{Jumlah Saldo Pinjaman (Saldo piutang)}} \times 100\% \\
 &= \frac{8.211.500.000}{11.955.000.000} \times 100\% \\
 &= 0,6869 \times 100\% \\
 &= 68,89\%
 \end{aligned}$$

Skor = 0

Berdasarkan hasil perhitungan kolektibilitas program kemitraan diperoleh nilai kolektibilitas program kemitraan sebesar 68,69% dengan skor 0, artinya kemampuan tingkat pengembalian dana yang tersalurkan dari kegiatan program

kemitraan PT. Perkebunan Nusantara IV sebesar 68,69% dari total keseluruhan dana yang disalurkan.

b. Kolektibilitas Program Kemitraan Tahun 2017

Tingkat kolektibilitas program Kemitraan pada PT. Perkebunan Nusantara IV pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Kolektibilitas Program Kemitraan Tahun 2017

| Kategorisasi | Nilai Pinjaman | Tingkat % | Nilai Pengembalian |
|----------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Lancar | Rp. 6.000.000.000 | 100% | Rp. 6.000.000.000 |
| Kurang lancar | Rp. 655.000.000 | 75% | Rp. 491.250.000 |
| Ragu-ragu | Rp. 345.000.000 | 25% | Rp. 86.250.000 |
| Macet | Rp. 1.180.000.000 | 0% | 0 |
| Rata-rata terbilang | Rp. 8.180.000.000 | | Rp. 6.577.500.000 |

Berdasarkan tabel kolektabilitas pinjaman di atas dapat dijelaskan bahwa nilai kolektibilitas program kemitraan pada tahun 2017 dapat di hitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Kolektabilitas} &= \frac{\text{Rata - rata nilai kolektabilitas}}{\text{Jumlah Saldo Pinjaman (Saldo piutang)}} \times 100\% \\
 &= \frac{6.577.500.000}{8.180.000.000} \times 100\% \\
 &= 0,8041 \times 100\% \\
 &= 80,41\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Skor} = 0$$

Berdasarkan hasil perhitungan kolektibilitas program kemitraan diperoleh nilai kolektibilitas program kemitraan sebesar 80,41% dengan skor 0, artinya

kemampuan tingkat pengembalian dana yang tersalurkan dari kegiatan program kemitraan PT. Perkebunan Nusantara IV sebesar 80,41% dari total keseluruhan dana yang disalurkan.

c. Kolektibilitas Program Kemitraan Tahun 2018

Tingkat kolektibilitas program Kemitraan pada PT. Perkebunan Nusantara IV pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Kolektibilitas Program Kemitraan Tahun 2018

| Kategorisasi | Nilai Pinjaman | Tingkat % | Nilai Pengembalian |
|----------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|
| Lancar | Rp. 6.120.000.000 | 100% | Rp. 6.120.000.000 |
| Kurang lancar | Rp. 700.000.000 | 75% | Rp. 525.000.000 |
| Ragu-ragu | Rp. 300.227.000 | 25% | Rp. 75.056.750 |
| Macet | Rp. 4.000.220.078 | 0% | 0 |
| Rata-rata terbilang | Rp. 11.120.447.078 | | Rp. 6.720.056.750 |

Berdasarkan tabel kolektabilitas pinjaman di atas dapat dijelaskan bahwa nilai kolektibilitas program kemitraan pada tahun 2018 dapat di hitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Kolektibilitas} &= \frac{\text{Rata - rata nilai kolektabilitas}}{\text{Jumlah Saldo Pinjaman (Saldo piutang)}} \times 100\% \\
 &= \frac{6.720.056.750}{11.120.447.078} \times 100\% \\
 &= 0,6043 \times 100\% \\
 &= 60,43\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Skor} = 0$$

Berdasarkan hasil perhitungan kolektibilitas program kemitraan diperoleh nilai kolektibilitas program kemitraan sebesar 60,43% dengan skor 0, artinya

kemampuan tingkat pengembalian dana yang tersalurkan dari kegiatan program kemitraan PT. Perkebunan Nusantara IV sebesar 60,43% dari total keseluruhan dana yang disalurkan.

Berdasarkan data hasil analisa diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tingkat efektifitas dan kolektibilitas pada program PKBL PT. Perkebunan Nusantara IV terhitung pada 3 tahun terakhir 2016-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.8.
Tingkat Efektivitas dan Kolektibilitas program Kemitraan

| Tahun | Efektifitas | Kolektibilitas |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| 2016 | 75.79% | 68,69% |
| 2017 | 71.73% | 80,41% |
| 2018 | 92.22% | 60,43% |

Berdasarkan data tabel persentase nilai tingkat efektifitas dan kolektibilitas pada tabel di atas diketahui perbandingan tingkat efektifitas dan kolektibilitas di program kemitraan diketahui tingkat efektifitas tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan dan ditahun 2018 mengalami kenaikan drastis. Sedangkan untuk tingkat kolektibilitas kredit cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Sedangkan untuk tingkat efektifitas dan kolektibilitas pada penyaluran kredit dipengaruhi oleh prinsip 5C yang belum dilaksanakan dengan optimal khususnya pada *capital*, *character* dan *colleteral*. Ketidaksesuaian antara survey dengan kenyataan membuat efektifitas program kemitraan PTPN IV Medan menurun khususnya di tahun 2017. Persentase perbandingan antara dana kemitraan ditahun 2017 yang disalurkan dan dana yang tersedia hanya sebesar 71,73%.

Terjadinya penurunan pada tingkat efektivitas dalam program kemitraan disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah:

- 1) Jumlah dana perbandingan penggunaan dana dan dana yang tersedia tidak berimbang dengan baik.
- 2) Tidak tersalurkannya dana yang tersedia disebabkan oleh calon nasabah yang mengajukan pinjaman program kemitraan dinilai tidak memenuhi syarat 5C kredit. Dimana pihak PTPN IV Medan ragu dengan nasabah dan memilih menahan dana yang tersedia untuk tidak disalurkan dan hasilnya kolektibilitas menurun.

Keterkaitan dengan masalah capital berhubungan dengan keadaan dan kondisi kesehatan aset yang dimiliki calon debitur untuk mengembalikan pinjaman dengan besar yang telah disepakati secara bersama pada awal permohonan yang diajukan. Dalam hal ini masih ada dijumpai dari calon mitra binaan maupun nasabah yang membuat rekayasa usaha yang dimilikinya, sehingga pihak survey terkecoh dengan masalah kepemilikan usaha yang dijamin sebagai dasar pengajuan pinjaman, dimana usaha tersebut terkesan fiktif yang dibuat hanya sebatas keperluan survey saja. Masalah lainnya juga sering muncul, dimana karakter mitra yang sulit untuk ditemui dengan berbagai alasan yang berakibat pada munculnya permasalahan. Mitra yang sering menunda pembayaran menjadi beban bagi pihak penyelenggara dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang menjadi beban perusahaan dalam mengumpulkan dana yang akan disalurkan dan digulirkan kembali ke mitra binaan yang lain yang akan melakukan pinjaman dana PKBL.

Sedangkan untuk perihal *collecteral* atau agunan yang diajukan oleh calon mitra binaan juga dinilai tidak sesuai dengan harga pasar, hal ini dapat mengakibatkan tingkat efektivitas kredit menurun dan cenderung berpotensi menjadi kredit macet, tidak hanya pada permasalahan tersebut saja, selain itu juga masih ada beberapa nasabah yang memiliki agunan, namun agunan yang diberikan oleh mitra binaan kepada pihak PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang status agunannya masih bermasalah.

Penilaian atas kelayakan pemberian kredit pada mitra PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dinilai dengan prinsip 5C dimana sebelum dana disalurkan kepada mitra, pihak PT. Perkebunan Nusantara IV Medan akan menilai kelayakan penerimaan dana berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capity, Collateral, dan Condition*) kepada nasabah untuk menghindari kemacetan dana yang disalurkan. Akan tetapi pada praktiknya pelaksanaan tidak sesuai dengan yang tercatat dan kredit macet tidak dapat dihindari oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Tingkat Kolektibilitas macet yang sangat tinggi dari standar kredit macet disebabkan oleh banyaknya dana yang sudah disalurkan tidak sesuai dengan jadwal dan waktu pengembaliannya

8. Bidang Usaha Dalam Program Kemitraan

Berikut di bawah ini merupakan bidang-bidang yang dijalankan oleh mitra Binaan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang terangkum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 4.4. Sektor Program Kemitraan

| No | Sektor | 2016 | MB | 2017 | MB | 2018 | MB |
|----|-------------|---------------|----|---------------|----|---------------|-----|
| | | Rp | | Rp | | Rp | |
| 1 | Industri | 955,000,000 | 18 | 800,000,000 | 20 | 900,000,000 | 15 |
| 2 | Perdagangan | 4,000,000,000 | 75 | 3,000,000,000 | 96 | 5,000,000,000 | 122 |
| 3 | Pertanian | 400,000,000 | 13 | 600,000,000 | 18 | 400,000,000 | 16 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|------------|
| 4 | Perikanan | 2,000,000,000 | 40 | 180,000,000 | 9 | 120,447,078 | 7 |
| 5 | peternakan | 600,000,000 | 8 | 900,000,000 | 17 | 1,000,000,000 | 40 |
| 6 | Perkebunan | 3,000,000,000 | 39 | 700,000,000 | 10 | 700,000,000 | 25 |
| 7 | Jasa | 1,000,000,000 | 35 | 2,000,000,000 | 65 | 3,000,000,000 | 40 |
| 8 | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 11,955,000,000 | 228 | 8,180,000,000 | 235 | 11,120,447,078 | 265 |

Berdasarkan data tabel klasifikasi sektor program kemitraan yang dijalankan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, lebih banyak didominasi pada sector perdagangan dan disusul dari sektor perkebunan dan sektor lainnya yang saling mendukung. Sektor penyaluran dana program kemitraan dipengaruhi oleh bagaimana sistem yang berlaku dalam penilaian calon mitra binaan.

B. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini didasari dari hasil penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang sistem pemberian pinjaman dana kepada Mitra Binaan oleh bagian program kemitraan dan bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

1. Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Pinjaman kepada Mitra binaan

Sistem pemberian pinjman dana sudah sesuai dengan prosedur yang ada, hal ini terlihat dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Pengajuan berkas berkas

Pada tahap pengajuan berkas-berkas dilakukan dengan cukup baik seluruh dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh calon mitra binaan sudah lengkap dan mewakili informasi yang dibutuhkan CDC PKBL. Untuk menganalisis calon mitra binaan, formulir pengajuan pinjaman yang disediakan oleh PKBL juga telah mewakili seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis kredit calon mitra binaan.

b. Tahap pemeriksaan berkas Pinjaman

Pada tahap pemeriksaan berkas pinjaman, sudah dilaksanakan secara baik. Penggunaan form checklist pada pemeriksaan berkas merupakan cara yang perlu dipertahankan CDC PKBL. Form ini mempermudah pekerjaan officer 2 untuk memeriksa kekurangan berkas apabila suatu saat dibutuhkan tanpa harus melihat berkas satu persatu.

c. Tahap Wawancara

Pelaksanaan tahap wawancara sudah dilakukan dengan baik. Pada tahap wawancara dilakukan secara langsung oleh kepala bagian CDC PKBL. Hal ini sangat baik, karena kepala bagian PKBL dapat langsung mengetahui calon mitra binaan.

d. Tahap survey lapangan

Pelaksanaan survey biasanya hanya dilakukan pada calon mitra binaan yang belum pernah mengajukan pinjaman, sedangkan calon mitra binaan yang sebelumnya pernah mengajukan pinjaman tidak dilakukan survey. Disarankan untuk seluruh calon mitra binaan yang belum maupun sudah pernah mengajukan pinjaman sebelumnya sebaiknya tetap dilakukan survey. Hal ini untuk melihat keadaan yang sebenarnya dari calon mitra binaan.

Terutama bagi yang calon mitra binaan yang sudah pernah mengajukan pinjaman sebelumnya dapat dilihat perkembangan usahanya setelah mengajukan pinjaman sebelumnya.

Disarankan pula untuk ditambahkan satu officer, sebagai officer 3 yang bertugas untuk melakukan survey terhadap mitra binaan pada pada sistem dan prosedur pemberian pinjaman. Hal ini untuk membantu Asisten manajer dalam mensurvey seluruh calon mitra binaan yang terdapat diseluruh wilayah medan dan sekitarnya, yang terkadang terlewatkan karena begitu banyaknya calon mitra binaan yang perlu disurvey, sementara terbatasnya tenaga Asisten Manajer yang harus mengerjakan hampir seluruh prosedur pemberian kredit dengan waktu yang terbatas.

d. Tahap analisis Kredit

Pelaksanaan analisis Kredit merupakan tahap yang paling sulit, karena pada tahap ini menentukan jumlah kredit yang diberikan kepada calon mitra binaan. Tahap analisis kredit ini dirasa sangat sulit diukur keefektifitasannya, karena sifatnya yang subjektif. Untuk dibutuhkan suatu acuan oleh Asman PKBL dalam mengambil keputusan dalam analisis kredit.

c. Tahap keputusan Kredit

Pada tahap keputusan kredit sudah dilakukan dengan cukup baik. Disarankan untuk pemberitahuan keputusan kredit ini dilaksanakan dengan adanya pengiriman surat resmi yang langsung dikirimkan kepada calon mitra binaan, selain pemberitahuan via telepon.

d. Tahap perjanjian Kredit

Pada tahap perjanjian kredit ini, calon mitra binaan telah resmi menjadi calon mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Pada tahap ini pula telah dilakukan dengan sangat baik.

e. Tahap pencairan kredit

Pada tahap pencairan kredit perlu diperbaiki, dikarenakan pada pencairannya, CDC PT. Perkebunan Nusantara IV Medan tidak mengetahui secara langsung dari pihak Bank Mandiri apakah uang telah diterima oleh mitra binaan ataukah belum.

f. Tahap pengembalian

Pada tahap Pengembalian pinjaman dana bergulir dilakukan setiap bulannya oleh mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang dibayarkan langsung ke rekening Unit CDC PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

Berdasarkan sistem pemberian pinjaman yang telah dibuat oleh PKBL sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan hal ini terlihat dari tahapan-tahapan tersebut. Namun kurangnya pemantauan dan pembinaan terhadap mitra binaan dalam menggunakan dana yang diserahkan mengakibatkan kemacetan dalam pengembalian pinjaman, ketika mitra binaan telah diberikan pinjaman dan pada saat tahap pengembalian mitra binaan terhambat dalam mengembalikan pinjaman. Pemantauan dan pembinaan Kredit yang dilakukan oleh PKBL dirasa masih kurang, tidak adanya upaya preventif oleh PKBL terhadap terjadinya kredit bermasalah. Dari sisi pengawasan, pinjaman bergulir produktif ini juga perlu dilakukan mengingat bahwa pinjaman yang diberikan merupakan amanah dari masyarakat, dan bertujuan untuk diberikan

secara bergantian kepada para kaum dhuafa yang memiliki usaha (Sinambela, 2016). Upaya baru dilakukan setelah terjadi keterlambatan pembayaran angsuran ataupun telah terjadi kredit bermasalah. Dalam pemantauan dan pembinaan kredit yang dapat dilakukan oleh PKBL, dengan dilakukan monitoring kelapangan rutin minimal 3 bulan sekali setelah pencairan pinjaman, terutama bagi mitra binaan yang mengalami keterlambatan pembayaran. Melalui upaya mendatangi langsung ketempat usaha mitra binaan dapat mencegah terjadinya kredit bermasalah oleh mitra binaan di kemudian hari serta memantau informasi terkini mengenai perkembangan usaha mitra binaan. Upaya ini juga didukung dengan tujuan pemberian kredit ini yakni untuk mengembangkan usaha-usaha mikro dan kecil di daerah Medan dan sekitarnya. PT. Perkebunan Nusantara IV juga dengan adanya upaya ini dapat memberikan masukan yang baik untuk perkembangan usaha mitra binaan.

Interaksi yang dilakukan antara UMKM dengan PKBL selalu berkomunikasi melihat perkembangan usaha para mitra binaan atau UMKM dan selalu mengupdate data keuangan para UMKM per 3 bulan sekali dan selalu memberi laporannya ke PKBL dan dari interaksi tersebut maka pihak UMKM akan mendapatkan manfaat yang di dapat seperti halnya pengembangan para usaha UMKM yang lebih baik dari sebelumnya yang dimana para UMKM selalu mengikuti peraturan yang di terapkan oleh PKBL yang diterapkan oleh Standart Operasioanal (SOP).

2. Analisis Tingkat Kolektibilitas PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Tingkat kolektibilitas macet mengalami peningkatan dikarenakan kurangnya pemantauan dan pembinaan yang dilakukan pihak PKBL kepada UMKM sehingga berdampak buruk terhadap UMKM tersebut, ketika diberikan pinjaman pihak PKBL membiarkan para usaha tersebut dan tidak melakukan pembinaan kepada para usaha sehingga banyaknya para usaha yang mengalami kemacetan dalam pengembalian pinjaman, disebabkan karena omset yang tidak mencapai, usaha yang tidak berjalan dengan lancar, bahkan usaha yang mengalami kebangkrutan. Sedangkan mereka wajib membayar cicilan pinjaman tersebut tetapi dengan omset yang sedikit merekapun tidak dapat membayar pinjaman. Maka dengan itu harus adanya pemantauan atau dibinanya suatu usaha agar dapat meminimalisasikan kemacetan, dengan dibinanya suatu usaha dapat dilihat sejauh mana kemajuan usaha. perkembangan usaha mereka secara tidak langsung akan memotivasi mereka untuk mengembangkan usaha ataupun mencari alternatif strategi untuk meningkatkan usahanya apabila dalam laporan tersebut ternyata usaha mereka menurun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Sistem Pemberian Pinjaman Dana Kepada Mitra Binaan oleh Bagian Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pemberian Pinjaman Dana Program Kemitraan BUMN dan Program Bina Lingkungan yang diterapkan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah sesuai dengan prosedur Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dengan Usaha Mikro dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan yang dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) Medan telah sesuai dengan ketentuan Permeneg PKBL yakni dari kriteria usaha kecil yang menjadi mitra binaan, cara pemberian kredit kepada calon mitra binaan, bentuk penyaluran program kemitraan, besar bunga kredit kemitraan. Tetapi kurangnya pemantauan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak PKBL sehingga masih banyak usaha yang bermasalah dalam pengembalian pinjaman.
2. Pada tingkat kolektabilitas kredit program kemitraan yang terjadi disebabkan oleh tingkat kredit macet yang bertambah setiap tahunnya menyebabkan pertumbuhan kredit yang berimbang dengan jumlah kredit

macet. Kurangnya pemantauan dan pembinaan terhadap para usaha yang mengakibatkan tingkat kolektibilitas macet yang meningkat

B. Saran

Berdasarkan hasil dari simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai bahan masukan antara lain :

1. PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sebaiknya memaksimalkan Program Bina Lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya dengan melaksanakan semua bentuk Program Bina Lingkungan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (2) huruf e Permeneg PKBL baik dengan bekerja sama dengan pihak lain atau pun melakukan survei mendalam di lingkungannya, sehingga Program Bina Lingkungan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat dirasakan maksimal manfaatnya oleh masyarakat.
2. Diharapkan kepada pihak PKBL PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sebaiknya melakukan survei yang mendalam sebelum menyalurkan dana, agar Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Survei dapat dilakukan dengan melihat bagaimana kebutuhan wilayah tersebut akan program-program pinjaman usaha kecil dan Bina lingkungan mengingat salah satu tujuan PKBL adalah untuk pemerataan ekonomi.
3. Perlu adanya pengawasan yang ketat pada usaha mitra, agar usahanya tetap berjalan dan meminimalkan risiko gagal bayar. Pengawasan dapat dilakukan dengan adanya kegiatan kumpulan rutin khusus mitra dengan

memberikan pengarahan dan sharing mengenai kondisi usaha. Tujuan dari pengawasan tersebut untuk memberikan motivasi kepada mitra dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chrismardani, Y. (2014) 'Komunikasi Pemasaran Terpadu: Implementasi Untuk Umkm', *Neo-Bis - Jurnal Neraca, Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), pp. 179–189. doi: 10.21107/nbs.v8i2.472.g442.
- Fitria, R. and Jurana, J. (2016) 'ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UKM (Studi Kasus Program Kemitraan PT TELKOM Cabang Palu Sulawesi Tengah)', *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), p. 262. doi: 10.21043/bisnis.v3i2.1495.
- FITRIANI, A. (2013) 'Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan pada BUMN', *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 1(1), pp. 137–148.
- goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2019) 'pengaruh Non ferforming Loan sebagai dampak krisis keuangan global terhadap profitabilitas perusahaan perbankan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Harahap, R. U. (2011) 'Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada kab./kota propinsi sumatera utara', 11(1), pp. 47–58.
- Ipb, M. P. I. (2003) 'Model Penyaluran Kredit Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Karakter Dan Kapasitas (Kasus Unit Kemitraan Dan Bina Lingkun', 23(3), pp. 1–12.
- Kasmir (2014) *Bank dan Lembaga Kuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada jakarta*.
- Kaunang, J. C., Sabijono, H. and Wangkar, A. (2017) 'Analisis Sistem Pemberian Kredit Program Kemitraan Bina Lingkungan Di Pt Jasa Raharja Persero Sulut', *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), pp. 605–613. doi: 10.32400/gc.12.2.17978.2017.
- Lukman dendawijaya (2005) 'Manajamen Lembaga Keuangan', *Jurnal Akuntansi*, 12(2), p. 15.
- Orlando, A. and Susanto, R. (2019) 'Mekanisme pencairan kredit usaha rakyat pada PT Bank Rakyat Indonesia unit Lubuk Buaya', *Jurnal keuangan dan manajemen keuangan*, 1(1), pp. 1–10. doi: 10.31219/osf.io/zuv2y.
- Saragih, F. and Surikayanti (2015) 'Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada UKM Medan Perjuangan', *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 2(1), p. 23.

Sari, D. N. and Fransisca, S. (2018) 'Analisis Prosedur Pinjaman Dana Kemitraan Oleh Bagian Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT. Pusri', 22(5), pp. 1–10.

Sari, T. M., Syam, D. and Ulum, I. (2012) 'Pengaruh Non Performing Loan Sebagai Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan', *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 13(2), pp. 83–98. Available at: <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/482>.

Sinambela, E. (2016) 'Analisis Model Penyaluran Dana ZIS Pada Baznas Sumatera Utara', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(4), pp. 1–14. Available at: http://www.ghbook.ir/index.php?name=یاه‌من‌اسر و گن‌مرف و ن‌یون&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chkhas hk=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component.

Suci, Y. R., Tinggi, S. and Ekonomi, I. (2017) 'Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia', *Jurnal Ilmiah fakultasi Ekonomi*, 6(1), pp. 51–58.

sukma Lesmana (2009) 'Penggunaan Metode Quick Scan Untuk Penerapan TQM Pada UKM', *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), pp. 80–105.

Utama, I. (2013) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *E-Jurnal Akuntansi*, 2(2), pp. 452–470.

Wijaya, D. and Irawan, R. (2018) 'Prosedur Administrasi Penjualan Pada Usaha Jaya Teknika Jakarta Barat', *Perspektif*, 16(1), pp. 26–30.

Wulandari, R. P. (2016) 'BERMASALAH (Studi Pada Divisi Community Development Center (CDC) PT Telekomunikasi Indonesia , Tbk . Sub Area Malang)', 37(2), p. 6.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.
Dosen Pembimbing : ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : YULANA SAPUTRI
NPM : 1505170475
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PEMBERIAN PINJAMAN DANA KEPADA MITRA BINAAN OLEH BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

| Tanggal | MATERI BIMBINGAN SKRIPSI | Paraf | Keterangan |
|---------|--|-------|-------------|
| | Bab III : - Perbaiki Definis operasional - Pendekatan penelitian - Teknik pengumpulan data | | Et. 19/9/19 |
| | Bab IV : - Perbaiki Hasil penelitian - pembahasan contoh program penelitian - Data yang digunakan | | Et. 19/9/19 |
| | Bab I : - Perbaiki kembali daftar belah mawani - Perbaiki Tabulasi data - perjas masalah penelitian - Uraian teori pendukung - Perbaiki daftar pustaka | | Et. 23/9/19 |
| | Bab II : - Perbaiki pembahasan - Kerangka Berpikir | | Et. 25/9/19 |

Dosen Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

Medan, September 2019

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : YULANA SAPUTRI
 N.P.M : 1505170475
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
 Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PEMBERIAN PINJAMAN DANA KEPADA MITRA BINAAN OLEH BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

| Tanggal | Deskripsi Bimbingan Skripsi | Paraf | Keterangan |
|---------|---|--------------|--------------|
| | Bab I: Perbaiki kutipan URM yg hp Tawar pendahuluan - deskripsi & Rumus ush | | Eft. 4/10/19 |
| | Bab II: - Kerangka Berpikir Bab III: - Hasil penelitian dan 5 - pembahasan | | |
| | Ukuran Skripsi - Abstrak - Kata pengantar - Daftar isi - Daftar pustaka | Eft. 3/10/19 | |
| | Selaku Bimbingan, Acc & ujikan pada sidang Meja hijau | | Eft. 4/10/19 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Pembimbing Skripsi

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Medan, September 2019
 Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN /SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : YULANA SAPUTRI

NPM : 1505170475

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atau usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/ Makalah/ Skripsi dan penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikian Pernyataan ini saat perbuatan dengan kesadaran sendiri

Medan, Oktober 2019

Pembuat Pernyataan



YULANA SAPUTRI

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Selasa, 09 Juli 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : YULIANA SAPUTRI
N.P.M. : 1505170475
Tempat / Tgl.Lahir : KISARAN, 30 JULI 1997
Alamat Rumah : JL.GUNUNG MAS NO.18 MEDAN
JudulProposal : ANALISIS SISTEM PEMBERIAN PINJAMAN DANA KEPADA MITRA BINAAN OLEH BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DI PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Disetujui / tidak disetujui *)

| Item | Komentar |
|----------|------------------------------------|
| Judul | |
| ab I | Fenomena masalah dijelaskan |
| ab II | teori disesuaikan kerangka konsep |
| ab III | |
| lainnya | Sistematika penulisan |
| simpulan | Perbaikan Minor Perbaikan Mayor |

Cat: Pagulas Duk 07.07/19

Medan, 09 Juli 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Pembanding

HJ. DAHRANI, SE, M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 09 Juli 2019 menerangkan bahwa:

Nama : YULIANA SAPUTRI
N .P.M. : 1505170475
Tempat / Tgl.Lahir : KISARAN, 30 JULI 1997
Alamat Rumah : JL.GUNUNG MAS NO.18 MEDAN

JudulProposal : ANALISIS SISTEM PEMBERIAN PINJAMAN DANA KEPADA MITRA BINAAN OLEH BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DI PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Elizar Sinambela, SE, M.Si 2/9.2019*

Medan, 09 Juli 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.SI

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.SI

Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.SI

Pembanding

HJ.DAHRANI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.SI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 699/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/1/12/2018

Nama Mahasiswa : YULANA SAPUTRI
NPM : 1505170475
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : KEUANGAN
Tanggal Pengajuan Judul : 1/12/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing : *Elizabeth Srambela* (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : *Analisis Sistem Pemberian Pinjaman Dana kepada Mitra Bisnis oleh bagian Program keahlianan (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)*
Bina Lingkungan (PEBL) PTAV IV

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

Fitriani Saragih
28/12/2018

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 21 Desember 2018

Dosen Pembimbing

Elizabeth Srambela 24/12-18
(Elizabeth Srambela SE, M.Si.)



81a menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1498/ TGS / IL.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **02 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Yulana Saputri**
N P M : **1505170475**
Semester : **VIII (Delapan)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Sistem Pemberian Pinjaman Dana Kepada Mitra Binaan Oleh Bagian Program (PKBL) Pada PTPN IV**

Dosen Pembimbing : **Elizar Sinambela., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **11 Mei 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Ramadhan 1440 H
13 Mei 2019 M

Dekan ✓



H. Sanuri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertiinggal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 9257 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 20 Rabiul Akhir 1440 H
28 Desember 2018 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Perkebunan Nusantara IV Medan
Jln. Letjen Suprpto No. 2
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Yulana Saputri
NPM : 1505170475
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Sistem Pemberian Pinjaman Dana Kepada Mitra Binaan Oleh Bagian (PKBL) Pada PTPN IV

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



ANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 28 Desember H
..... 2016M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Y U C A N A S A P U T R I

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 4 7 5

Tempat.Tgl. Lahir : 3 0 0 7 1 9 9 7
A E A S E L A B A T

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L G U N U N G M A S N O 1 8

Tempat Penelitian : P T P N I V

Alamat Penelitian : J L L E T J E N S U P R A P T O
N O 2 M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Frian' Sarip L. S. S. S.)

Wassalam
Pemohon

(Yuliana Saputri)